

BAB VI

PENUTUP

6. 1. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis pada tesis dengan judul “Analisis Terhadap Manajemen Pemberian Visa on Arrival”, yang dihasilkan dari data hasil observasi ditambah data studi dokumen dan dilengkapi dengan hasil wawancara informan yang dibutuhkan kemudian dianalisa dengan operasionalisasi faktor dari teori yang digunakan yaitu fungsi - fungsi manajemen maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan manajemen dari pemberian Visa on Arrival saat ini sudah cukup memadai. Kesimpulan ini didapat dari analisa terhadap implementasi fungsi – fungsi manajemen dalam pelaksanaan pemberian VoA:

1. Fungsi Perencanaan

Bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan langkah – langkah dalam perencanaan sebelum mengeluarkan kebijakan Visa on Arrival antara lain menentukan maksud dan tujuan dari pemberian VoA, melakukan kerjasama dan menganalisa hambatan yang ada sehingga dalam pelaksanaan dapat berjalan baik.

Memenuhi unsur – unsur dari suatu perencanaan seperti dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi terdapat gambaran tentang teknis pelaksanaan pelayanan VoA. Fungsi perencanaan Ditjenim telah melaksanakan dengan baik dengan langkah – langkah seperti menentukan maksud dan tujuan dari dikeluarkannya kebijakan pemberian VoA, membuat prosedur yang dijadikan standarisasi pelaksanaan pemberian VoA, menunjuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang diberikan wewenang untuk melaksanakan pelayanan pemberian VoA, serta membuat kerjasama dengan Bank Negara Indonesia sebagai pengumpul PNBP.

2. Fungsi Pengorganisasian

Namun pada fungsi pengorganisasian juga sudah berjalan baik namun terdapat beberapa perbaikan ke depan agar pelaksanaan pemberian VoA dapat sesuai dengan harapan. Perbaikan yang dimaksud dalam sektor

staffing. Hasil observasi di lapangan menemukan kekurangan jumlah pegawai, kurangnya kualitas petugas Imigrasi yang melaksanakan pemberian VoA. Kualitas tersebut meliputi kemampuan bahasa dan penguasaan teknologi yang digunakan pada pemberian VoA. Masalah yang lain adalah pengadaan dan perawatan sarana dan pra sarana dalam hal ini komputerisasi dan sistem yang digunakan.

3. Fungsi Kepemimpinan

Pada fungsi kepemimpinan juga sudah dilaksanakan oleh Kepala Unit atau Kepala Pos Imigrasi dengan melakukan *monitoring* terhadap kinerja anggotanya dan memberikan *briefing* untuk memberikan informasi dan arahan tentang pelaksanaan tugas. Kemudian penyelesaian masalah juga dilaksanakan dengan berkoordinasi termasuk mendengarkan masukan dari anggotanya.

4. Fungsi Pengawasan

Sistem Pengawasan Kinerja Pegawai yang diawasi melalui mekanisme yang sudah ditetapkan oleh Orta Direktorat Jenderal Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi juga sudah cukup memadai. Dengan langkah kendali yang ditetapkan antara lain standarisasi pengukuran prestasi kerja, mengukur prestasi kerja, mengambil tindakan korektif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30. Pengawasan kinerja petugas ini dilaksanakan oleh masing – masing Kepala Unit dibantu oleh para supervisor.

2. Dari observasi dan wawancara di lapangan peneliti menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan pemberian VoA yaitu:

1. Keterbatasan pengadaan sarana penunjang berupa komputer dan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang dapat mendukung kelancaran pemberian VoA.
2. Kendala berikutnya adalah kualitas Sumber Daya Manusia yang ada saat ini belum dapat membantu peningkatan kualitas pemberian VoA. Kebanyakan dari petugas Imigrasi yang bertugas tidak mempunyai kemampuan bahasa yang penting dalam memberikan informasi tentang

prosedur VoA dan menjelaskan suatu masalah yang dihadapi. Penguasaan teknologi informasi terutama operasionalisasi komputer dan pembuatan laporan pelaksanaan pemberian VoA yang berisi informasi dapat berguna bagi Ditjenim untuk dijadikan statistik pemberian VoA dan pengawasan administratif tentang keberadaan dan kegiatan Orang Asing di wilayah Indonesia.

6.2. Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian Visa on Arrival sebagai berikut:

1. Meningkatkan fungsi pengorganisasian oleh Ditjenim antara lain dengan langkah membuat suatu sistem penerimaan pegawai pada lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi yang ketat dan mengacu pada pola pendidikan dan pelatihan yang mampu menciptakan peningkatan kualitas dan profesionalisme pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Kemudian memperbaiki kualitas pelaksanaan program pendidikan seperti Akademi Imigrasi, pelatihan teknis seperti Pendidikan Teknis Keimigrasian maupun pendidikan umum seperti program pasca sarjana Universitas Indonesia pada Konsentrasi Kajian Strategik Keimigrasian.
2. Melakukan kerjasama untuk mengusahakan pengembalian sebagian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan Imigrasi dari pemberian VoA untuk dimanfaatkan membangun Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang dapat menunjang pelaksanaan pemberian VoA.